

TRANSFORMASI SALURAN POLITIK ETNIS TIONGHOA DI PROVINSI SUMATERA UTARA PASCA ORDE BARU

Rudi Salam Sinaga

Universitas Medan Area, Kota Medan-Indonesia

Email Korespondensi: rudisalam@staff.uma.ac.id

ABSTRACT

General elections (elections) that took place in the post-new order era (1999-2014) with various changes to the electoral system and the results of the elections have presented a different geopolitical situation than before. This condition resulted in a "new" geopolitics at every level of the election, including in North Sumatra Province. This paper aims to explore the transformation of ethnic Chinese political channels in North Sumatra province in the 4 post-New Order elections in the context of the election of members of the regional parliament for North Sumatra province. This paper uses a qualitative descriptive method. Data obtained through interviews, literature and documentation. The interview informants came from several ethnic Chinese politicians, several political party officials and ethnic Chinese community leaders in North Sumatra. The results of this paper get a transformation of changes in ethnic Chinese political channels as a response to the strengthening of democratic values and opportunities to gain political office are increasingly wide open.

Keywords: Chinese Ethnicity, Political Channels, Transformation.

ABSTRAK

Pemilihan umum (Pemilu) yang berlangsung di era pasca orde baru (1999-2014) dengan berbagai perubahan sistem pemilu berikut hasil pemilu telah menghadirkan situasi geopolitik yang berbeda dari sebelumnya. Kondisi ini menghasilkan geopolitik yang "baru" pada setiap jenjang pemilu termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi transformasi saluran politik etnis tionghoa di provinsi sumatera utara pada 4 pemilu pasca orde baru dalam konteks pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sumatera utara. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Informan wawancara berasal dari beberapa politisi etnis tionghoa, beberapa pengurus partai politik dan tokoh masyarakat etnis tionghoa di Sumatera Utara. Hasil dari tulisan ini mendapatkan transformasi perubahan saluran politik etnis tionghoa sebagai respon dari menguatnya nilai demokrasi dan kesempatan untuk meraih jabatan politik semakin terbuka luas..

Kata Kunci : Etnis Tionghoa, Saluran Politik, Transformasi.

PENDAHULUAN

Saluran politik di dalam negara demokrasi dapat di akses melalui institusi non pemerintah dan institusi pemerintah. Aktor yang dapat memerankan penghubung kepentingan biasanya di perankan oleh aktivis atau politisi. Secara formal aktor politisi yang berada di lembaga legislatif memiliki peran yang lebih luas dalam memperjuangkan kepentingan warga masyarakat. Dengan demikian tidak mengherankan bila banyak kajian empiris menempatkan studi keterwakilan politik sebagai saluran politik warga. Konsep keterwakilan politik menekankan hadirnya keterlibatan warga negara yang berada disetiap segmentasi (mayoritas dan minoritas) untuk terlibat dalam urusan negara melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif (lihat Pitkin, 1967; Cohen, 1968; Seitz, 1995; Bybee, 1998; Marin, 2001; Ankersmit, 2002).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 8 Nomor 3 Maret 2022

Sejumlah penelitian telah berupaya menjelaskan upaya negara dan upaya kelompok etnis minoritas untuk mencapai keterwakilan politik di lembaga legislatif seperti dengan membaca disertasi Adolino (1993) dan McKee (2017) yang melakukan studi kasus di Inggris, Fang (2015) mengambil studi kasus di Amerika Serikat. Dalam bentuk artikel Folke, Freidenvall, & Rickne (2015) membahas keterwakilan perempuan dari etnis minoritas. Kemudian dari sisi dampak perubahan electoral threshold Kook (2017) tersebut terhadap keterwakilan politik etnis minoritas. Saalfeld dan Bischof (2013) mengeksplorasi keterwakilan dan kepentingan politik etnis minoritas di lembaga legislatif. Artikel Sobolewska, Fieldhouse, dan Cutts (2013) mendeskripsikan keterwakilan etnis minoritas di lembaga legislatif Inggris dan artikel Juenke & Shah (2016) menganalisis aspek permintaan sekaligus ketersediaan sumber daya manusia dari etnis minoritas menjadi legislatif.

Studi penelitian terdahulu yang telah dilakukan cenderung menganalisis keterwakilan politik etnis pada lokasi negara yang menerapkan kuota keterwakilan politik etnis dalam Pemilu legislatif. Studi ini berada pada lokasi yang berbeda dari penelitian yang pernah ada. Studi ini berada pada negara demokrasi yang tidak mengadopsi sistem kuota keterwakilan etnis namun memperlihatkan upaya etnis minoritas untuk meraih keterwakilan politik etnis mereka (secara informal) dalam Pemilu legislatif melalui bentuk mencalonkan diri sebagai kandidat legislatif dan memobilisasi suara dari organisasi komunitas etnis. Fenomena ini terindikasi terjadi di Indonesia pada kasus etnis Tionghoa di pemilihan anggota DPRD (local legislature) Provinsi Sumatera Utara di era Pasca Orde Baru (Pemilu 1999-2014).

Etnis Tionghoa sebagai etnis minoritas di Indonesia dengan jumlah populasi sekitar 3 % di tahun 2000 (Arifin, Hasbullah, & Pramono, 2017: 6). (Freedman, 2000: 12-13) menyebutkan dengan jumlah populasi mereka 3% mereka mampu menguasai 70 persen sektor ekonomi Indonesia. Pernyataan ini ditentang oleh beberapa pihak yang lebih meyakini 70 persen etnis Tionghoa menguasai sektor ekonomi swasta di Indonesia bukan ekonomi Indonesia (sektor negara). Kiprah etnis Tionghoa yang sukses di ekonomi sektor swasta karena mayoritas etnis Tionghoa Indonesia secara budaya menyukai profesi sebagai pedagang (lihat Koning, 2007). Pada era Orde Baru profesi masyarakat etnis Tionghoa sebagai pedagang semakin menguat dengan diterbitkannya kebijakan yang menempatkan etnis Tionghoa hanya pada area ekonomi swasta.

Pada konteks lokal di daerah Provinsi Sumatera Utara etnis Tionghoa juga sebagai etnis minoritas di provinsi ini. Pada provinsi ini menurut data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil sensus penduduk (SP) tahun 2010 populasi etnis Tionghoa berjumlah 2, 55 persen atau sekitar 340.320 jiwa (BPS RI, 2011: 36-41). Dalam segmentasi agama secara mayoritas etnis Tionghoa memeluk agama Budha dan Konghucu. Berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan agama menurut data SP tahun 2010 memperlihatkan jumlah pemeluk agama Budha berjumlah 2,34 persen atau sekitar 303.548 jiwa dan agama Konghucu berjumlah 0,01 persen atau sekitar 984 jiwa (BPS RI, 2011: 42-45). Terhadap kondisi ini maka predikat etnis minoritas melekat kuat pada etnis Tionghoa di Provinsi Sumut.

Sistem Pemilu yang digunakan dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara adalah mengacu pada sistem Pemilu yang digunakan secara nasional di Indonesia yaitu sistem Pemilu Proporsional Terbuka. Sistem Pemilu di Indonesia hanya mengakomodasi keterwakilan politik kelompok minoritas dalam segmentasi keterwakilan perempuan dalam daftar kandidat legislatif disetiap tingkatan Pemilu (Pemilu di tingkat Pusat disebut Dewan Perwakilan Rakyat dan di tingkat daerah kota/kabupaten disebut DPRD) sebesar 30 % . Meski sistem Pemilu yang digunakan tidak mengakomodasi konsep keterwakilan politik berdasarkan etnis namun dalam konteks pemilihan anggota Provinsi Sumatera Utara pasca Orde Baru memperlihatkan fenomena yang mengindikasikan etnis Tionghoa sebagai kelompok etnis minoritas melakukan upaya-upaya yang kuat untuk meraih keterwakilan politik mereka di lembaga DPRD Provinsi Sumatera Utara. Studi ini akan mengeksplorasi transformasi saluran politik etnis Tionghoa meraih keterwakilan politik pada

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



pemilihan anggota DPRD (local legislature) di Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung pada era Pasca-Orde Baru (Pemilu 1999-2014).

METODE

Tulisan ini berjenis penelitian kualitatif. Metode deskriptif digunakan dalam menguraikan jawaban penelitian. Data didapatkan melalui wawancara mendalam bersama beberapa informan kunci dan informan utama. Informan berasal dari unsur politisi dari kalangan etnis tionghoa, unsur pengurus partai politik dan unsur tokoh masyarakat dari kalangan etnis tionghoa. Keseluruhan informan berdomisili di Provinsi Sumatera Utara. Studi pustakan dan dokumentasi digunakan untuk mendukung tersedianya data dalam upaya menjawab pertanyaan dalam tulisan ini. Triangulasi digunakan untuk memperkuat keabsahan data.

PEMBAHASAN

Partisipasi Politik Etnis Tionghoa di Era Pasca Orde Baru

Menurut Indra Wahidin (Wahidin) seorang tokoh etnis Tionghoa di Provinsi Sumatera Utara yang menjabat sebagai pemimpin di organisasi komunitas etnis Tionghoa (Perhimpunan Indonesia Tionghoa/Perhimpunan INTI) dan pemimpin di organisasi agama Budha (Perwakilan Umat Budha Indonesia/WALUBI) menjelaskan partisipasi etnis Tionghoa sebagai Kandidat DPRD Provinsi Sumatera Utara di era Pasca Orde Baru berkaitan dengan perubahan rejim pemerintahan dari otoriter (Orde Baru) ke demokrasi (Pasca-Orde Baru). Demokrasi memberikan ruang terbuka bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Keterbukaan ini di apresiasi masyarakat etnis Tionghoa, terutama dari kalangan generasi muda etnis Tionghoa yang memberikan ekspektasi tinggi untuk menjadi kandidat DPRD (local legislature) di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten. Ekspektasi kalangan generasi muda etnis Tionghoa muncul karena disebabkan sistem Pemilu telah terbuka. Pada sisi lain persepsi dari generasi muda etnis Tionghoa tidak menganggap diri mereka sebagai orang asing lagi, karena telah mereka lahir dan tumbuh berkembang di Indonesia (Wahidin, Wawancara, 20 Februari 2017).

Pada Pemilu di era pasca Orde Baru partisipasi politik etnis Tionghoa sebagai Kandidat di tingkat Provinsi Sumut pertama kali terlihat di Pemilu tahun 1999 dengan munculnya Haryanto berkompetisi di Dapil Sumut 10 meliputi wilayah Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Haris (2014: 39) dan Tandjung (2007: 109) mencatat PKP dibentuk pada tahun 1998 di masa-masa proses mundurnya rejim Orde Baru berkuasa di Indonesia. PKP dipersiapkan mengikuti Pemilu di tahun 1999. PKP merubah nama di Pemilu tahun 2004 menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Secara ideologi Vermonde (2014: 83) mencatat PKP atau PKPI sebagai partai yang berhaluan ideologi nasionalis dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. PKPI sebagai partai terbuka, nasionalis dan berdasar Pancasila dijelaskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Tahun 2009.

Pada Pemilu tahun 1999 Haryanto sebagai satu-satunya Kandidat etnis Tionghoa dalam arena kontestasi di pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran Haryanto sebagai kandidat tunggal dari kalangan etnis Tionghoa mengindikasikan pada Pemilu tahun 1999 kalangan etnis Tionghoa masih sedikit jumlahnya yang tertarik terjun ke dunia politik terutama untuk berkontestasi di jabatan legislatif. Kondisi ini masih dianggap wajar karena pada Pemilu ini etnis Tionghoa baru mendapatkan hak politik mereka (Haryanto, Wawancara, 2017). Meski beberapa tokoh nasional yang berafiliasi ke partai politik diketahui sebagai tokoh yang berperan penting dalam "Gerakan Reformasi" yang pada akhirnya memberikan keuntungan bagi etnis Tionghoa melalui terwujudnya persamaan hak dalam segala bidang namun demikian Haryanto memilih partai "baru" sebagai saluran politik menuju lembaga DPRD Provinsi Sumatera Utara. Pada Pemilu tahun 1999 Haryanto tidak berhasil terpilih

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 8 Nomor 3 Maret 2022

menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara meskipun sebagai Kandidat etnis Tionghoa satu-satunya di tingkat Provinsi (KPU Provinsi Sumatera Utara, 1999).

Pemilu tahun 2004 memunculkan tiga figur etnis Tionghoa yang maju menjadi Kandidat DPRD di tingkat Provinsi yaitu Ferdinan Godang dari Partai Demokrat (PD), Sonny Firdaus dari Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) dan Haryanto dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Pada Pemilu ini ketiga Kandidat etnis Tionghoa menyebar pada tiga partai politik dari 24 partai politik yang menjadi peserta Pemilu. Pada Pemilu ini saluran politik yang digunakan Kandidat etnis Tionghoa adalah partai politik dengan ideologi nasionalis. PDIP sebagai partai nasionalis yang berasal dari partai "lama" memiliki sejarah panjang dan memiliki kekuatan politik yang besar. PKPI sebagai partai "baru" dan tergolong sebagai partai yang baru merintis kekuatan politik. PPIB sebagai partai "baru" namun teridentifikasi dipersiapkan sebagai saluran politik bagi kalangan etnis Tionghoa karena didirikan sejumlah tokoh-tokoh nasional dari etnis Tionghoa. Hasil Pemilu tahun 2004 ini menetapkan Sonny Firdaus dari PPIB sebagai Kandidat terpilih (KPU Provinsi Sumatera Utara, 2004).

Partisipasi politik etnis Tionghoa meningkat di Pemilu 2009 pada Pemilu ini terdapat 10 figur etnis Tionghoa yang menjadi Kandidat di tingkat Provinsi. Sepuluh Kandidat etnis Tionghoa yaitu Kwik Sam Ho Alias Dharwan Widjaja dan Lina Alias Liu Wan Ling dari Partai Golongan Karya (Golkar), Ridho Alias Kwa Phing An dari Partai Barisan Nasional (PBN), Haryanto dari PKPI, Brilian Moktar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ramli dari PD, Sukiwi Tjong dari Partai Damai Sejahtera (PDS), Kie Hock Kweng dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Sonny Firdaus dan Tjoa Seng Hie dari Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB: sebelumnya bernama Partai Perhimpunan Indonesia Baru). Partisipasi politik etnis Tionghoa untuk menjadi Kandidat terlihat tersebar di 8 partai politik dari 44 partai politik yang menjadi peserta Pemilu. Kondisi ini memperlihatkan tidak terjadi polarisasi saluran politik berdasarkan pilihan partai. Jumlah Kandidat etnis Tionghoa yang meningkat jumlahnya dari Pemilu tahun 2004 serta saluran politik (partai) yang luas mengindikasikan tidak terjadi soliditas di internal kelompok etnis di arena Pemilu.

Pada Pemilu tahun 2009 mayoritas kandidat etnis Tionghoa masih memilih saluran politik mereka melalui partai politik berhaluan nasionalis kecuali terdapat 1 Kandidat etnis Tionghoa yang memilih partai berideologi agama-nasionalis berbasis masa Kristen yaitu PDS. Keadaan ini bisa disebabkan sulitnya mencari dukungan dari partai nasionalis yang tergolong sebagai partai besar atau partai berideologi agama-nasionalis dianggap sebagai partai alternatif dengan segmentasi pemilih yang berbeda. Hasil Pemilu tahun 2009 menempatkan 3 Kandidat etnis Tionghoa terpilih menjadi anggota DPRD yaitu Brilian Moktar (PDIP), Sony Firdaus (PPIB) dan Ramli (PD) masing-masing bersaing di daerah pemilihan Sumut 1 (KPU Provinsi Sumatera Utara, 2009).

Pemilu tahun 2014 partisipasi etnis Tionghoa yang menjadi Kandidat mengalami peningkatan dari Pemilu tahun 2009. Jumlah etnis Tionghoa menjadi Kandidat di Pemilu tahun 2014 berjumlah 12 orang yaitu Ng Kok Pheng (PKB), Ramli dari PD, Tjia Susanto Wijaya (PAN), Yo Emil Lines (PDIP, Juliutari (PDIP), Sukiran (PDIP), Brilian Moktar (PDIP) dan Ferdinan Godang (PDIP), Haryanto dan Shanny Joan Salim dari PKPI, Tony Chandra dan Sonny Firdaus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Kedua belas Kandidat etnis Tionghoa pada Pemilu ini tersebar ke dalam 6 partai politik dari 12 partai politik yang menjadi peserta Pemilu. Jumlah pilihan partai sebagai saluran politik Kandidat etnis Tionghoa dalam Pemilu ini tergolong banyak seperti di Pemilu tahun 2009. Tampaknya dalam Pemilu tahun 2014 partai baru seperti Gerindra dianggap sebagai partai alternatif bagi beberapa figur etnis Tionghoa atas berkurangnya jumlah partai akibat tidak berhasil memperoleh parliamentary threshold (ambang batas parlemen) di Pemilu atau disebabkan faktor lain yang telah dipersyaratkan peraturan perundang-undangan. Hasil dari Pemilu tahun 2014 menetapkan Brilian Moktar (PDIP) dan Sonny Firdaus (Gerindra) sebagai Kandidat terpilih (KPU Provinsi Sumatera Utara, 2014).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



Jumlah etnis Tionghoa yang lebih banyak maju menjadi kandidat legislatif dari PDIP di Pemilu tahun 2014 menurut Henry Jhon Hutagalung (Wakil Ketua PDIP Provinsi Sumatera Utara) tidak terlepas dari efek positif yang muncul sikap keterbukaan PDIP terhadap etnis Tionghoa di Provinsi Sumatera Utara. Jhon memberikan contoh di pemilihan kepala daerah Kota Medan tahun 2010 PDIP sebagai satu-satunya partai yang berani mengakomodasi etnis Tionghoa sebagai calon kepala daerah. Sikap PDIP ini dipersepsikan etnis Tionghoa sebagai bentuk kepedulian PDIP terhadap etnis Tionghoa (Jhon, Wawancara, 21 Oktober 2018). Sikap PDIP yang pernah mencalonkan kandidat kepala daerah dari etnis Tionghoa cukup membuat publik “terkejut”. Dengan jumlah populasi etnis Tionghoa yang tidak terlalu besar publik menganggap langkah PDIP ketika itu keliru dan jauh dari kemenangan. Namun demikian pada pemilihan kepala daerah Kota Medan tahun 2010 yang berlangsung sebanyak dua kali (dua putaran) PDIP yang mengusung Sofyan Tan di saat itu berhasil menjadi peserta di pemilihan ke dua kalinya meski pada akhirnya tidak terpilih.

Tabel: Partisipasi Etnis Tionghoa Menjadi Kandidat Legislatif di Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Pilihan Partai Politik Kandidat Berdasarkan Ideologi Partai

Pemilu	Jumlah Kandidat	Partai Politik	Ideologi Partai	Kandidat Terpilih
1999	1 orang	1. PKP	Nasionalis	Tidak terpilih
2004	3 orang	1. PD	Nasionalis	1 orang dari PPIB Dapil Sumut 1.
		2. PPIB	Nasionalis	
		3. PKPI	Nasionalis	
2009	10 orang	1. PDIP	Nasionalis	1 orang dari PDIP, 1 orang dari PD, 1 orang dari PPIB (total 3 orang terpilih dari Dapil Sumut 1
		2. PPIB	Nasionalis	
		3. PD	Nasionalis	
		4. PPRN	Nasionalis	
		5. PBN	Nasionalis	
		6. PKPI	Nasionalis	
		7. Golkar	Nasionalis	
		8. PDS	Agama-Nasionalis	
2014	12 orang	1. PDIP	Nasionalis	1 orang dari PDIP, 1 orang dari Gerindra (Total 2 orang terpilih dari Dapil Sumut 1)
		2. Gerindra	Nasionalis	
		3. PAN	Agama-Nasionalis	
		4. PKPI	Nasionalis	
		5. PKB	Agama-Nasionalis	
		6. PD	Nasionalis	

Sumber: data diolah dari data Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 1999-2014.

Tabel di atas memperlihatkan saluran politik etnis Tionghoa sebagai kandidat legislatif di tingkat Provinsi pada empat Pemilu di era pasca Orde Baru mengalami transformasi pilihan saluran politik. Transformasi tersebut terjadi dari partai berideologi nasionalis kemudian berubah ke dua pilihan tipe ideologi partai yaitu partai ideologi nasionalis dan partai ideologi agama-nasionalis. Keadaan ini mengindikasikan kandidat etnis Tionghoa tidak mempersoalkan batas-batas ideologi yang ada diantara partai. Kondisi ini terjadi karena figur etnis Tionghoa hanya memperhatikan peluang yang tersedia untuk menjadi kandidat legislatif di tiap partai. Asumsi-asumsi ini berkaitan dengan sistem Pemilu demokrasi yang liberal, terbuka dan berdasarkan suara terbanyak. Fokus utama setiap kandidat adalah mencari suara sebanyak-banyaknya di Pemilu. Menurut Indra Wahidin (salah satu pemimpin organisasi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksi@governance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



komunitas etnis Tionghoa di Provinsi Sumatera Utara) fenomena pilihan partai politik yang berbeda di kalangan kandidat etnis Tionghoa mencerminkan sikap masyarakat etnis Tionghoa yang menerima nilai-nilai demokarsi. Menghormati perbedaan pandangan politik dan pilihan partai politik (Wahidin, Wawancara, 20 Februari 2017).

Transformasi Saluran Politik di Era Pasca Orde Baru

Heterogenitas pilihan partai yang terdapat di kalangan masyarakat etnis Tionghoa selain mencerminkan nilai demokrasi namun juga memperlihatkan “perpecahan” di arena politik dan memunculkan asumsi tidak adanya kepemimpinan kelompok etnis sebagaimana klaim studi etnis yang “memotret” peran pemimpin etnis dalam mengkonsolidasikan solidaritas etnis. Dalam catatan literatur etnis Tionghoa di Indonesia diklasifikasikan kedalam dua jenis golongan yaitu totok dan peranakan (lihat Walujono, 2014: 19; Hew, 2011: 23-24). Totok diartikan sebagai etnis Tionghoa yang lahir di negara Tionghoa namun hidup di Indonesia dan peranakan diartikan sebagai etnis Tionghoa yang lahir dan hidup di Indonesia. Etnis Tionghoa memiliki budaya yang sangat heterogen dan sangat kompleks (lihat Oetomo, 1984: 85-101). Uraian ini telah menepis pendapat yang mempersepsikan etnis Tionghoa sebagai etnis yang homogen.

Fakta memperlihatkan beberapa dari kandidat etnis tionghoa telah berulang kali menjadi kandidat legislatif di tingkat Provinsi sejak Pemilu demokratis yang berlangsung di era Pasca Orde Baru. Fakta ini menjelaskan terdapat motivasi yang kuat pada beberapa kandidat etnis Tionghoa untuk menjadi anggota legislatif Provinsi Sumatera Utara. Pada sisi lain beberapa kandidat etnis Tionghoa menunjukkan sikap loyalitas yang berbeda dalam menentukan saluran politik (partai) di setiap Pemilu. Perpindahan beberapa kandidat etnis Tionghoa dari satu partai politik ke partai politik yang lain menjelang Pemilu mengindikasikan adanya suatu sebab yang mendorong kandidat etnis Tionghoa untuk berpindah partai. Prilaku politik etnis Tionghoa yang melakukan perpindahan partai politik disebabkan sistem Pemilu yang digunakan memberikan peluang tersebut (terbuka). Penyebab lainnya terdapat pengaruh dari aktor di dalam kelompok etnis yang memberikan informasi mengenai partai politik yang ideal. Aktor berusaha menarik individu-individu etnis Tionghoa untuk berpindah partai politik. Aktor memberikan informasi mengenai partai politik yang ideal dan berpihak dengan kepentingan kelompok etnis Tiongho. Keadaan ini menggambarkan teori “Ethnic Attractors” yang disebutkan Birnir (2007: 20) mengenai adanya aktor dalam kelompok etnis yang menyuplai informasi tentang partai politik dan menarik kelompok etnis untuk bergabung ke partai politik tertentu dan memilih partai tersebut saat Pemilu berlangsung.

Heterogenitas saluran partai politik yang digunakan etnis Tionghoa untuk menjadi kandidat legislatif pada empat Pemilu pasca-Orde Baru memperlihatkan beberapa figur dari kandidat etnis Tionghoa tidak nyaman dengan partai yang “lama” (berpindah partai). Faktor penyebabnya adalah aspirasi yang tidak terakomodasi, perbedaan pandangan politik dan partai tidak lagi menjadi peserta Pemilu. Situasi ini menjadi faktor pendorong bagi suksesnya tujuan “Ethnic Attractors” untuk menarik figur kandidat lainnya bergabung ke partai yang “baru”. Keadaan ini seperti ini disinggung Birnir (2007: 17) dalam demokrasi yang maju, anggota kelompok etnis yang memiliki perwakilan di lembaga parlemen berperan untuk menstabilkan politik Pemilu. Anggota kelompok etnis yang tidak terwakili akan keluar dari politik Pemilu dan mencari cara alternatif untuk menyuarakan tuntutan politik mereka. Dengan kata lain “Ethnic Attractors” yang dimaksudkan dalam kasus ini adalah aktor politisi dari etnis Tionghoa.

Keterkaitan argumen Birnir (2007: 17) dalam konteks studi ini etnis Tionghoa yang telah (pernah) terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut dipersepsikan sebagai perwakilan politik salah satu kelompok etnis Tionghoa yang berada di dalam organisasi komunitas etnis. Figur etnis Tionghoa lainnya yang belum pernah terpilih merasa perlu untuk menggunakan saluran politik (partai) lainnya

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan berharap mendapatkan dukungan mobilisasi suara dari organisasi komunitas Tionghoa yang berbeda. Upaya melakukan mobilisasi dukungan politik ditujukan ke basis-basis komunitas etnis Tionghoa yang belum pernah terlibat memberikan dukungan politik di arena Pemilu.

Birnir (2007: 33-34) menyinggung keadaan di arena Pemilu “Ethnic Attractors” melakukan sosialisasi kepada kelompok etnis mengenai sejumlah kebijakan yang diperjuangkan partai politik dan kandidat bila terpilih di Pemilu yang berimplikasi pada terakomodasinya kepentingan-kepentingan kelompok etnis. “Ethnic Attractors” muncul dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi berkaitan dengan Pemilu. Meskipun di arena sistem Pemilu terbuka dan demokratis kelompok etnis memerlukan informasi dari sumber (aktor) yang dapat dipercaya, aktor tersebut berasal dari internal etnis dengan kapasitas pengetahuan yang dianggap lebih luas. Dalam konteks kasus keterlibatan etnis Tionghoa sebagai Kandidat DPRD Provinsi Sumatera Utara didapati perilaku politik etnis Tionghoa di Pemilu era Pasca Orde Baru dipengaruhi sejumlah figur etnis Tionghoa yang berperan sebagai “Ethnic Attractors” yang secara konsisten melakukan sosialisasi politik untuk kepentingan PKP dan PDIP di Pemilu sekaligus membentuk karir pribadi mereka di politik melalui maju sebagai Kandidat DPRD Provinsi Sumatera Utara di beberapa Pemilu.

KESIMPULAN

Transformasi saluran partai politik kandidat etnis Tionghoa di empat Pemilu era Pasca-Orde Baru memperlihatkan pergeseran pilihan saluran partai politik (dari ideologi partai nasionalis ke kombinasi dua partai; partai nasionalis dan partai agama-nasionalis) dipengaruhi beberapa sebab yaitu: 1) menurunnya kepercayaan terhadap partai berideologi nasionalis 2) menguatnya pengaruh partai berideologi agama-nasionalis dan 3) sistem multi partai dan pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan suara terbanyak telah membuka ruang yang luas bagi setiap warga negara termasuk etnis Tionghoa untuk mencari “tempat” sebagai kandidat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolino, J. R. (1993). Representation and political Integration: Ethnic Minority Local Councillors in Britain [The Ohio State University]. In *Dissertation*.
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?0::NO:10:P10_ACCESSION_NUM:osu1487842372897165
- Ankersmit, F. (2002). *Political Representation*. Stanford Univ. Press.
- Arifin, E. N., Hasbullah, M. S., & Pramono, A. (2017). Chinese Indonesians: how many, who and where? *Asian Ethnicity*, 18(3), 310–329. <https://doi.org/10.1080/14631369.2016.1227236>
- Birnir, J. K. (2007). *Ethnicity and Electoral Politics*. Cambridge University Press.
- Bybee, K. J. (1998). *Mistaken Identity: The Supreme Court and the Politics of Minority Representation*. Princeton Univ. Press.
- Cohen, J. (1968). Commentary: Representation and the Problem of Identity. In J. R. Pennock & J. W. Chapman (Eds.), *Representation*. Atherton Press.
- Fang, A. H. (2015). Minority Political Representation under Demographic Change in the United States. In *Dissertation*. Columbia University.
- Folke, O., Freidenvall, L., & Rickne, J. (2015). Gender Quotas and Ethnic Minority Representation: Swedish Evidence from a Longitudinal Mixed Methods Study. *Politics & Gender*, 11(2), 345–381. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1017/S1743923X15000069>
- Freedman, A. L. (2000). *Political Participation and Ethnic Minorities: Chinese Overseas in Malaysia, Indonesia and the United States*. Routledge.
- Haris, S. (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hew, W. W. (2011). Negotiating Ethnicity and Religiosity: Chinese Muslim Identities in Post-New

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 8 Nomor 3 Maret 2022

- Order Indonesia. In *Dissertation*. The Australian National University.
- Indonesia, B. P. S. (2011). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*.
- Juenke, E. G., & Shah, P. (2016). Demand and Supply: Racial and Ethnic Minority Candidates in White Districts. *The Journal of Race, Ethnicity, and Politics*, 1(1), 60–90.
<https://doi.org/10.1017/rep.2015.2>
- Koning, J. (2007). Chineseness and Chinese Indonesian Business Practices: A Generational and Discursive Enquiry. *East Asia*, 24(2), 129–152. <https://doi.org/10.1007/s12140-007-9011-2>
- Kook, R. (2017). Representation, minorities and electoral reform: the case of the Palestinian minority in Israel. *Ethnic and Racial Studies*, 40(12), 1–19.
<https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1277027>
- Marin, L. (2001). *On Representation* (trans. C.). Stanford University Press.
- McKee, R. (2017). The Substantive Representation of Ethnic Minorities in the UK Parliament [University of Manchester]. In *Dissertation*.
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/files/64900422/FULL_TEXT.PDF
- Otomoto, D. (1984). The Chinese of Pasuruan: a Study of Language and Identity in a Minority Community in Transition [Cornell University]. In *Dissertation*.
<http://search.proquest.com/docview/303287497?accountid=13771>
- Pitkin, H. F. (1967). *The Conception of Political Representation*. University of California Press.
- Saalfeld, T., & Bischof, D. (2013). *Minority-Ethnic MPs and the Substantive Representation of Minority Interests in the House of Commons, 2005 – 2011. December 2012*, 305–328.
- Seitz, B. (1995). *The Trace of Political Representation*. State University of New York Press.
- Sobolewska, M., Fieldhouse, E., & Cutts, D. (2013). Taking minorities for granted? Ethnic density, party campaigning and targeting minority voters in 2010 British general elections. *Parliamentary Affairs*, 66(2), 329–344. <https://doi.org/10.1093/pa/gss088>
- Tandjung, A. (2007). *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Vermonte, P. J. (2014). People, Places and Voting Behavior: The Case of Indonesia's 2004 Legislative Elections. In *Dissertation*. Northern Illinois University.
- Walujono, A. (2014). The Discrimination of the Ethnic Chinese in Indonesia and Perceptions of Nationality [The Claremont Colleges]. In *Thesis*.
https://scholarship.claremont.edu/scripps_theses/508/

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksi@governance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:

